

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PERMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori *Stakeholders*

Menurut Safitri dan Muid (2020), Teori *stakeholder* menyebutkan bahwa semua pihak yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan yang berperan sebagai alat pengatur. Dengan demikian, perusahaan perlu mengakui dan memperhatikan kepentingan pemerintah, seperti yang berkaitan dengan isu perpajakan. Perusahaan diharapkan menjalankan tanggung jawabnya dengan patuh dalam membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku kepada pemerintah, serta menghindari praktik penghindaran pajak.

Stanford Research Institute (SRI) adalah lembaga yang pertama kali menggunakan konsep *stakeholder*. Lembaga ini mendefinisikan *stakeholders* sebagai kelompok yang mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi. *Stakeholder* adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Stakeholder mempunyai dua tujuan utama, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan operasinya pada periode tertentu dan membantu

memprediksi perilaku perusahaan tersebut. Dengan kata lain perusahaan dalam beroperasi membutuhkan bantuan dari pihak luar salah satunya adalah dukungan dari masyarakat dan lingkungan.

Stakeholder dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, karena *stakeholder* memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari peran *stakeholder*. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan para *stakeholder* dan memberikan nilai tambah kepada para *stakeholder* (Hidayah, 2017).

Utami dan Tahar (2018) menjelaskan bahwa teori *stakeholder* dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

1. *Descriptive/Empirical*, yang menyatakan bahwa teori digunakan untuk menjelaskan karakter khusus dan perilaku perusahaan.
2. *Instrumental*, sebagai tambahan dari data *descriptive*, maka teori digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara manajemen *stakeholders* dengan hasil yang didapatkan (profitabilitas, pertumbuhan, dll).
3. *Normative*, yang menyatakan bahwa teori digunakan untuk menginterpretasikan fungsi dari perusahaan, termasuk mengidentifikasi pedoman moral dan filosofi pada operasi dan manajemen perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori kedua yang mempengaruhi pemikiran laporan berkelanjutan adalah teori legitimasi. Teori Legitimasi menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Kedua teori baik *legitimacy theory* dan *stakeholders theory* merupakan teori yang menjelaskan motivasi para manajer atau organisasi untuk melakukan pengungkapan laporan keberkelanjutan

Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Laporan yang mencakup aktivitas perusahaan dalam bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti yang tercatat dalam *sustainability report*, dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini sebagai upaya agar keberadaan organisasi dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi dari masyarakat merupakan salah satu sumber daya operasional yang penting bagi perusahaan (Tarigan dan Samuel, 2014)

Deegan, Robin dan Tobin dalam Amri (2015) menyatakan bahwa:

“Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antarakeberadaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.”

Legitimacy theory suatu perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan yang salah satunya adalah pengungkapan *sustainability report* sebagai perwujudan dari legitimasi di dunia bisnis.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.

Menurut Sujai et al. (2022) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan oleh investor. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, karena rasio profitabilitas menggambarkan hasil akhir dari kebijakan dan keputusan operasional perusahaan.

Menurut Kasmir (2019:114) menyatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Husnan dan Pudjiastuti, (2018:76) pengertian rasio profitabilitas adalah:

“... rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya”

Menurut Kasmir, (2017:176), tujuan dan manfaat menggunakan profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;

2.1.3.2 Metode Pengukuran Profitabilitas

Ada beberapa rumus yang biasa dipergunakan untuk mengukur rasio profitabilitas (Martono dan Harjito, 2018:60), sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rumus yang digunakan untuk menghitung gross profit margin:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok}}{\text{Penjualan bersih}}$$

2. *Net Profit Margin*

Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

3. *Return On Investment* atau *Return On Assets*

Rasio ROI atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva (assets) yang dipergunakan.

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return On Equity*

Return on Equity (ROE) atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.

Menurut Riyanto (2016:313), ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan, baik dilihat dari segi nilai saham, nilai penjualan maupun nilai aset.

Menurut Simbolon dan Sueb, (2016) Ukuran perusahaan adalah faktor penentu penting dalam pengungkapan perusahaan. Perusahaan besar memiliki jumlah aset, penjualan dan sistem informasi yang baik sehingga pengungkapan

memungkinkan menjadi lebih luas. Selain itu perusahaan yang besar akan lebih terlihat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap sosial lingkungan.

Kemudian menurut Consoladi, dkk. dalam Heni Oktaviani (2019) mengatakan bahwa “Ukuran perusahaan dapat memengaruhi kinerja Keuangan perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan.”

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis pengertian Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai nilai seperti *equity*, penjualan, dan aset perusahaan, semakin besar nilai tersebut mencerminkan perusahaan yang semakin kuat atau besar.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Harahap (2016:23) mengemukakan bahwa pengukuran variabel ukuran perusahaan berdasarkan total aktiva. Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

Menurut Putu Ayu dan Gerianta (2018) rumus perhitungan ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total aktiva)}$$

Uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

2.1.5 *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Signifikansi peranan *Corporate Governance (CG)* untuk kestabilan dan kesejahteraan masyarakat tergambar dari definisi yang diberikan oleh Cadbury dalam buku Lukviarman (2016:17) yaitu

“Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interest of individuals, corporations and society.”

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas utama perusahaan pemerintah adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan yang akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini untuk menyamakan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam Effendi (2016), pengertian *Good Corporate Governance (GCG)* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengontrol dengan merinci aturan atau prosedur tentang pengambilan keputusan terkait urusan perusahaan,

mengarahkan dengan membimbing perusahaan untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan terarah lebih baik dari sebelumnya, hal tersebut yang mengacu pada satu tujuan yaitu berusaha menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien sekaligus mampu melindungi hak-hak dari para pelaku perusahaan sehingga terwujudlah perusahaan yang lebih baik, produktif dan akhirnya akan tercipta stabilitas ekonomi nasional.

2.1.5.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip mendasar dari kegiatan-kegiatan perusahaan atau korporasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi investor dan *stakeholder*. Menurut *National Committee on Governance* dalam Sukrisno (2017) mengemukakan bahwa lima prinsip GCG, Prinsip-prinsip GCG menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar berjalan lancar dilihat dari prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), Responsibilitas (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) atau dikenal sebagai TARIF.

Penjelasan dari lima prinsip tersebut sebagai mana yang tertuang dalam pedoman *Good Corporate Governance* yang dipublikasikan oleh National Committee on Governance adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas adalah sebagai berikut:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
 - b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- ### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
 - b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip kesetaraan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masingmasing.

- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Sedangkan menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG Pada BUMN, yaitu terdiri atas:

1. Transparansi (*transparency*)
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*)
yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*)
yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016) penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan GCG menurut Ketut dan Devy (2017), yaitu:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya

akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.

2.1.5.4 Metode Pengukuran *Good Corporate Governance*

Dalam penelitian ini pengukuran *good corporate governance* berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-431/BL/2012 Peraturan nomor X.K.6. Terdapat 18 poin yang memuat 99 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan tersebut telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*. Item-item tersebut ialah:

Tabel 2. 1

Indeks *Good Corporate Governance*

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> a. Uraian mengenai hak pemegang saham. b. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. c. Tanggal pelaksanaan RUPS. d. Hasil RUPS.
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> a. Nama-nama anggota Dewan Komisaris b. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukanindependen).

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. d. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. e. Mekanisme dan kriteria kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. f. Jumlah rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi. g. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. h. Mekanisme pengambilan keputusan
3	Direksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. b. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. c. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. d. Mekanisme pengambilan wewenang. e. Mekanisme pendelegasian wewenang. f. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. g. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. h. Kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat. i. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi. j. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasi pada tahun buku, serta alasan jika belum direalisasikan.
4	Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan c. Riwayat pendidikan. d. Periode jabatan anggota Komite Audit. e. Pengungkapan independensi Komite Audit. f. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit. g. Tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat. h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) Komite Audit.
5	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		<p>dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.</p> <p>c. Periode jabatan anggota komite.</p> <p>d. Riwayat Pendidikan</p> <p>e. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>f. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>g. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>i. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>
6	Komite Manajemen Risiko	<p>a. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko.</p> <p>b. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko.</p> <p>c. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko.</p> <p>d. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko.</p> <p>e. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat.</p> <p>f. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko.</p> <p>g. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.</p>
7	Komite-Komite Lain Yang Dimiliki Oleh Perusahaan	<p>a. Nama anggota komite.</p> <p>b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.</p> <p>c. Riwayat pendidikan.</p> <p>d. Periode jabatan anggota komite.</p> <p>e. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite.</p> <p>f. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat.</p> <p>g. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite.</p> <p>h. Independensi anggota komite.</p>
8	Sekretaris Perusahaan	<p>a. Nama Sekretaris Perusahaan.</p> <p>b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.</p> <p>c. Riwayat pendidikan.</p> <p>d. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan.</p> <p>e. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.</p>
9	Audit Internal	<p>a. Nama anggota audit internal.</p> <p>b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.</p>

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Struktur dan kedudukan unit audit internal. d. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) unit audit internal. e. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku.
10	Sistem Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. b. <i>Review</i> atas efektivitas sistem pengendalian intern.
11	Manajemen Risiko Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan. b. Jenis risiko dan cara pengelolaan risiko. c. <i>Review</i> atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.
12	Perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, entitas abaka, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokok perkara/gugatan. b. Status penyelesaian perkara/gugatan. c. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
13	Pernyataan Sanksi Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang sanksi administrasi yang dikenakan kepada Emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris dan direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku berakhir.
14	Akses Informasi dan Data Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. b. Daftar penyebaran informasi ke publik.
15	Kode Etik dan Budaya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokok-pokok kode etik. b. Pokok-pokok budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). c. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya. d. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan.
16	Sistem Pelaporan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara penyampaian pelanggaran. b. Perlindungan bagi pelapor. c. Penanganan pengaduan. d. Pihak yang mengelola pengaduan. e. Hasil dari penanganan pengaduan.
17	Pernyataan Penerapan GCG	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. b. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. c. Kepatuhan terhadap pedoman GCG.

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Keberadaan Board Manual. e. Struktur tata kelola perusahaan. f. Hasil penerapan GCG selama setahun. g. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.
18	Informasi Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi perusahaan. b. Misi perusahaan. c. Nilai-nilai perusahaan. d. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. e. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau perusahaan publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga <i>exercise</i>. f. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. g. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. h. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Jika struktur *good corporate governance* diungkapkan, maka diberikan poin 1, dan jika tidak diungkapkan maka diberikan poin 0.

Adapun rumusnya menurut Juan L yang dikutip pada dalam Rahmayanto (2022) :

$$GCGD = \frac{\text{Score Corporate Governance Disclosure}}{\text{Maximum Total Score}}$$

2.1.6 Sustainability Report

2.1.6.1 Definisi Sustainability Report

Menurut Lako (2018), *Sustainability Reporting* (SR) adalah suatu model pelaporan informasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dengan pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environment reporting*) dan pelaporan tata kelola korporasi (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan.

Menurut Elkington yang dikutip dalam Tarigan dan Samuel (2015), *sustainability report* adalah laporan yang tidak hanya memuat informasi kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga informasi non keuangan seperti aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan yang memungkinkan perusahaan bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berarti memberikan informasi yang berkaitan tentang hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

Andreas (2017:128) menjelaskan mengenai *sustainability report* yaitu SR didesain untuk membantu korporasi merencanakan, mempersiapkan, melaporkan, dan mengungkapkan informasi tentang komitmen, pelaksanaan, pengukuran, pengungkapan, serta pertanggungjawaban korporasi terhadap kinerja pengelolaan isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan serta tata kelola korporasi kepada para *stakeholder* internal dan eksternal demi mewujudkan visi serta tujuan berkelanjutan korporasi dan para *stakeholder*. ...

2.1.6.2 Tujuan Pembuatan *Sustainability Report*

Menurut Veronica (2022), pembuatan dan penyebaran *sustainability report* (Laporan Keberlanjutan) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, *stakeholder convening*, dan sebagainya).
3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah.
4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.”

2.1.6.3 Manfaat Pembuatan *Sustainability Report*

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* dalam (Wijayanti, 2016), manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain:

1. Memberikan informasi kepada *stakeholders* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi;
2. Membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang;
3. Menjadi cerminan bagaimana perusahaan dalam mengelola risikonya;
4. Digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi;
5. Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian system manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial;

6. Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang; dan
7. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.1.6.4 Prinsip-Prinsip *Sustainability Report*

Sustainability Report disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan GRI. Prinsip pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan oleh karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan.

Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan dan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan menjelaskan proses yang harus diterapkan untuk mengidentifikasi apa konten yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, dan harapan, serta kepentingan yang *substantive* dari para pemangku kepentingannya. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan memberikan arahan berupa pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Kualitas informasi adalah hal yang penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dalam membuat asesmen kinerja yang masuk akal serta mengambil tindakan yang tepat (*Global Reporting Initiative, 2022*).

Prinsip-prinsip untuk menentukan konten *Sustainability Report* (*Global Reporting Initiative, 2022*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka.

2. Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi dimasa mendatang terhadap peningkatan atau penurunan konsidi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan serta sosial ditingkat lokal, regional atau global.

3. Materialitas

Laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial mempengaruhi assesmen dan keputusan pemangku kepentingan.

4. Kelengkapan

Laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan serta untuk memungkinkan pemangku kepingtngn dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan

Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas *Sustainability Report* (*Global Reporting Initiative*, 2022) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya assesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Komparabilitas

Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisa perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

3. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup sesuai akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi.

4. Ketepatan Waktu

Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

5. Kejelasan

Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.

6. Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi”

2.1.6.5 Proses Penyajian *Sustainability Report*

Menurut Effendi (2016:212) proses penyajian *sustainability report* dilakukan melalui 5 mekanisme, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan merumuskan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya,
2. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan publik terhadap perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan yang ramah lingkungan juga menekan perusahaan untuk mengembangkan standar kinerja dan laporan keberlanjutan bagi pemasok dan rantai toko mereka,
3. Keterlibatan pemangku kepentingan,
4. *Voluntary codes*. Dalam mekanisme ini, masyarakat menuntut perusahaan merumuskan seluruh aspek kinerja keberlanjutan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan keberlanjutan. Jika perusahaan belum menerapkannya, harus memberikan instruksi,
5. Mekanisme lain adalah rating dan benchmarking, pajak, dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.

Laporan keberlanjutan dapat dipublikasikan secara terpisah atau diintegrasikan ke dalam laporan tahunan. Beberapa alasan mengapa perusahaan memberikan laporan keberlanjutan terpisah dari laporan tahunan adalah sebagai berikut:

1. Laporan keberlanjutan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan pengembangan yang berkelanjutan,
2. Memperoleh *positive image* (citra positif) dari pemangku kepentingan,
3. Pencarian legitimasi dari pemangku kepentingan.

2.1.6.6 Metode Pengukuran *Sustainability Report*

Sustainability Report merupakan salah satu cara perusahaan untuk memberikan informasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Salah satu standar yang digunakan dalam *Sustainability Report* adalah *GRI Standard*. Pengungkapan standar *Sustainability Report* berdasarkan (Global Reporting Initiative, 2022) Standar adalah :

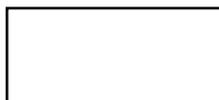
1. Standar GRI 2 Pengungkapan Umum
2. Standar GRI 3 Topik Material
3. Standar GRI 200 Pengungkapan Ekonomi
4. Standar GRI 300 Pengungkapan Lingkungan
5. Standar GRI 400 Pengungkapan Sosial

Item-item pengungkapan *sustainability report* dapat diukur dengan menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI), yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative* (GRI). Perhitungan SRDI dilakukan dengan

memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan.

Rumus perhitungan pengungkapan *sustainability report* adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{n}{k}$$



Keterangan:

SRDI = *Sustainability Report Disclosure Index*

n = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

k = Jumlah item yang seharusnya diungkapkan

Tabel 2. 2
Indeks *Sustainability Report Disclosure*
Berdasarkan GRI Indikator *Standards*

No	Pengungkapan GRI	Deskripsi
GRI 2 Pengungkapan Umum		
Organisasi dan Praktik Pelaporan		
1.	GRI 2-1	Rincian Organisasi
2.	GRI 2-2	Entitas yan dimasukan dalam laporan keberlanjutan organisasi
3.	GRI 2-3	Periode, frekuensi, dan itik kontak pelaporan
4.	GRI 2-4	Penyajian kembali informasi
5.	GRI 2-5	Penjamin eksternal
Aktivitas dan Pekerja		
6.	GRI 2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya
7.	GRI 2-7	Tenaga kerja
8.	GRI 2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung
Tata Kelola		
9.	GRI 2-9	Struktur dan komposisi tata kelola
10.	GRI 2-10	Pencalnana dan pemlihan badan tata kelola tertinggi
11.	GRI 2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi
12.	GRI 2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
13.	GRI 2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
14.	GRI 2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan

No	Pengungkapan GRI	Deskripsi
15.	GRI 2-15	Konflik kepentingan
16.	GRI 2-16	Komunikasi masalah penting
17.	GRI 2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
18.	GRI 2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
19.	GRI 2-19	Kebijakan remunerasi
20.	GRI 2-20	Proses untuk menentukan remunerasi
21.	GRI 2-21	Rasio kompensasi total tahunan
Kebijakan dan Praktik		
22.	GRI 2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan
23.	GRI 2-23	Komitmen kebijakan
24.	GRI 2-24	Menanamkan komitmen kebijakan
25.	GRI 2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif
26.	GRI 2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah
27.	GRI 2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
28.	GRI 2-28	Asosiasi keanggotaan
Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
29.	GRI 2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
30.	GRI 2-30	Perjanjian perundingan kolektif
GRI 3 Topik Material		
31.	GRI 3-1	Proses menentukan topik material
32.	GRI 3-2	Daftar topik material
33.	GRI 3-3	Manajemen topik material
GRI 200 Pengungkapan Ekonomi		
GRI 201 Kinerja Ekonomi		
34.	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
35.	GRI 201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
36.	GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
37.	GRI 201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016		
38.	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
39.	GRI 202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat
61.	GRI 303-3	Pengambilan air
62.	GRI 303-4	Pembuangan air
63.	GRI 303-5	Konsumsi air
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016		
64.	GRI 304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
65.	GRI 304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
66.	GRI 304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi

No	Pengungkapan GRI	Deskripsi
67.	GRI 304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
GRI 305: Emisi 2016		
68.	GRI 305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
69.	GRI 305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
70.	GRI 305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
71.	GRI 305-4	Intensitas emisi GRK
72.	GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK
73.	GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
74.	GRI 305-7	Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya
GRI 306: Efluen dan Limbah 2016		
75.	GRI 306-1	Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan
76.	GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
77.	GRI 306-3	Tumpahan yang signifikan
78.	GRI 306-4	Pengangkutan limbah yang berbahaya
79.	GRI 306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan atau limpahan air
GRI 306: Limbah 2020		
80.	GRI 306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
81.	GRI 306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah
82.	GRI 306-3	Timbulan limbah
83.	GRI 306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016		
84.	GRI 306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016		
85.	GRI 308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
86.	GRI 308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 400 Sosial		
GRI 401: Kepegawaian 2016		
87.	GRI 401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
88.	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
89.	GRI 401-3	Cuti melahirkan
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016		
90.	GRI 402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018		
91.	GRI 403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
92.	GRI 403-2	Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
93.	GRI 403-3	Layanan kesehatan kerja
94.	GRI 403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
95.	GRI 403-5	Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja

No	Pengungkapan GRI	Deskripsi
96.	GRI 403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
97.	GRI 403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
98.	GRI 403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
99.	GRI 403-9	Kecelakaan kerja
100.	GRI 403-10	Penyakit Akibat Kerja
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016		
101.	GRI 404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
102.	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
103.	GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016		
104.	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
105.	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
GRI 406: Nondiskriminasi 2016		
106.	GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016		
107.	GRI 407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
GRI 408: Pekerja anak 2016		
108.	GRI 408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016		
109.	GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
GRI 410: Praktik Keamanan 2016		
110.	GRI 410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016		
111.	GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016		
112.	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
113.	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016		
114.	GRI 414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
115.	GRI 414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 415: Kebijakan Publik 2016		
116.	GRI 415-1	Kontribusi politik
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016		
117.	GRI 416-0	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori

No	Pengungkapan GRI	Deskripsi
		produk dan jasa
118.	GRI 416-1	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016		
119.	GRI 417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
120.	GRI 417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
121.	GRI 417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
122.	GRI 418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data

Sumber: GRI (Global Reporting Initiative, 2022)

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Dalam penelitian ini, penulis juga memperoleh data dan informasi dari beberapa penelitian sebelumnya guna mempermudah proses penelitian. Berikut penelitian-penelitian terkait *sustainability report*.

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nadiah Afifah, Lailah Fujianti, dan Yuana Rizky Octaviani Mandagi (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i>	Hasil menunjukkan bahwa Profitabilitas yang diproposikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainable reporting</i> . Sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran Perusahaan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> .
2	Nur Fatin Kasbun, Boon Heng Teh, dan Tze San Ong (2021)	<i>Sustainability reporting and financial performance of Malaysian public listed companies</i>	<i>There is still insufficient evidence to conclusively show that companies which disclosed or reported on economic, social and environmental sustainability have a better financial performance compared with those who do not disclose or practise sustainability reporting. This study found that some companies reported on economic, social and environmental sustainability in previous years but did not report in the current year. The situation is similar with CSR reporting whereby the reports are insufficient with companies only reporting a few sustainability activities and only reported on sustainability generally without focusing on each of the sustainability dimensions (economic, social and environmental).</i>
3	Sely Megawati Wahyudi dan Ahmad Sohibul B. (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan Profitabilitas, Komite Audit, dan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
4	Kelvin Setiawan, Mukhzardfa, dan Achmad Hizazi (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia)	Secara simultan, pengungkapan <i>sustainability report</i> dipengaruhi oleh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Secara parsial, pengungkapan <i>sustainability report</i> tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Periode 2013-2017)	pengungkapan <i>sustainability report</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> Secara keseluruhan, pengungkapan <i>sustainability report</i> dipengaruhi oleh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan sebesar 57% - 59,2%.
5	Rotua Aprilya Tobing, Zuhrotun Zuhrotun, dan Ruserlistyani (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia	Hasil dari penelitian ini variabel Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> . Sedangkan variabel <i>Leverage</i> , Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
6	Rara Gustina, Wahyudin Nor, M. Huda (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan dan <i>Firm Value</i> dengan <i>Sustainability Reporting</i> sebagai Variabel Intervening	Dua hipotesis yang hasilnya berpengaruh, yaitu <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>company value</i> . Selanjutnya ada sepuluh hipotesis yang tidak berpengaruh yaitu, <i>corporate governance</i> terhadap <i>sustainability reporting</i> , ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, <i>company value</i> dan <i>sustainability reporting</i> , <i>sustainability reporting</i> terhadap kinerja keuangan dan <i>company value sustainability reporting</i> sebagai variabel intervening.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Susana Dewi (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap <i>Sustainability Report</i> serta Dampaknya Kepada Nilai Perusahaan	Hasil dari penelitian ini ialah Profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan yang diukur dengan total asset berpengaruh positif pada pengungkapan <i>sustainability report</i> . Adapun pengungkapan <i>sustainability report</i> yang diukur dengan SRDI tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
8	Ana Wahyuningsih dan Nera Marida (2018)	Pengaruh <i>size</i> , <i>Leverage</i> dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR Pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab social (CSR) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
9	Lucia dan Rosinta Ria Panggabean (2018)	<i>The Effect Of Firm's Characteristic and Corporate Governance To Sustainability Report Disclosure</i>	<i>The size of the company's profitability and positive effect on the disclosure of sustainability report, the audit committee disclosure negatively affect sustainability report. Meanwhile, profitability and liquidity variables no differences between the manufacturing companies.</i>
10	Putu Ayu W. dan Gerianta Wirawan S. (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Free Cash Flow</i> , dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan	Disimpulkan profitabilitas berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan maka nilai perusahaannya akan meningkat. Sedangkan variabel <i>free cash flow</i> tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, berdasarkan hasil

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			penelitian ini <i>free cash flow</i> tidak memiliki peran dalam meningkatkan nilai perusahaan.
11	Shilpa S. Motwani Dan Hemal Pandya (2016)	<i>A Study of Sustainable Disclosure Practices of Indian Corporates</i>	<i>Indian companies have recognized the importance of sustainability reporting and the major companies are reporting on it. More companies have started using the latest version of GRI for reporting on sustainability. An increase has been noticed in the percentage score of companies in both the versions of GRI G3.1 & G4.</i>
12	Sisca Pradnyamita Saridewi, Gede Putu Agus Jana Susila, Fridayana Yudiaatmaja (2016)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Corporate Socail Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan	Profitabilitas dan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
13	Abdul Aziz (2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Hasil menunjukkan hanya kepemilikan saham manajerial yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan sustainability report. Sementara itu, variabel lain seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> .

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
14	Daljono (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Mengindikasikan bahwa jumlah total aset, total karyawan, dan komite, <i>governance committee</i> memiliki dampak yang positif terhadap penyajian laporan keberlanjutan. Sementara itu, elemen-elemen seperti profitabilitas, likuiditas, rasio pembayaran dividen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
15	Aurin Wahyu Kusuma & Denies Priantinah (2017)	Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Yang Bergabung Di Issi Dan Konvensional Periode 2014-2016.	Pengungkapan Sustainability Report berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan, Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan.

Sumber: Jurnal terpublikasi yang telah diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Sustainability Report*

Menurut Sartono (2015) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat. Profitabilitas yang sehat disebabkan perusahaan mampu menghasilkan laba secara optimal. Profitabilitas yang tinggi maka

investor akan semakin percaya terhadap tingkat pengembalian yang akan diterima dari besarnya laba yang dihasilkan (Rusdianto, 2016).

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan akan melaporkan *sustainability report* yang lebih besar begitupula sebaliknya Setiawan dkk. (2019). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholders* bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Pengungkapan *sustainability report* mampu menggambarkan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat (Lucia dan Panggabean, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid dkk. (2017), Kelvin Setiawan, dkk (2019), dan Afifah dkk. (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Sustainability Report*

Menurut Nurfia Dewi (2018) mengatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Semakin besar total aset maka ukuran perusahaan semakin besar, namun jika semakin kecil total aset maka ukuran perusahaan semakin kecil.

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan bagi para investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan, perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan

nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Novari dan Lestari, 2016).

Perusahaan dengan ukuran yang besar lebih banyak mendapat sorotan dari publik. Maka dari itu, perusahaan yang besar cenderung lebih banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas sebagai upaya untuk menjaga legitimasi perusahaan. Legitimasi perusahaan dapat diwujudkan melalui pengungkapan *sustainability report*, maka semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan melaporkan *sustainability report* semakin meningkat (Prasyoho, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Rotua Aprilya Tobing, Zuhrotun, dan Ruserlistyani (2019) dan Putu Ayu (2018) tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan *sustainability report*.

2.2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Sustainability Report*

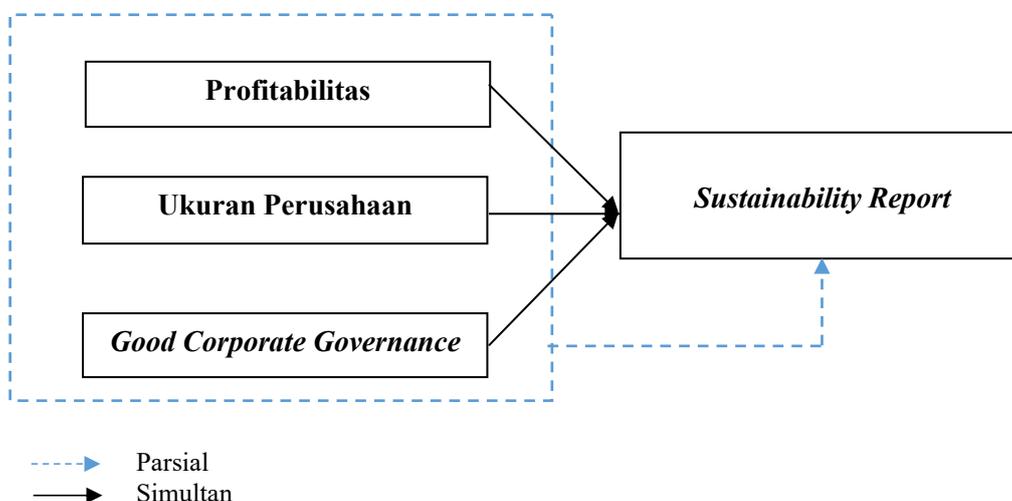
Good corporate governance merupakan suatu struktur atau proses yang dilakukan perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholders*) berdasarkan peraturan yang berlaku. *Corporate governance* sebagai pengatur kesetaraan hubungan diantara *stakeholders* sehingga tidak hanya mengutamakan beberapa *stakeholders* saja tetapi dapat menyetarakan

berbagai macam kepentingan *stakeholders* demi menjaga keberlangsungan perusahaan (Rahmayanto, 2022).

Kemudian *good corporate governance* digunakan sebagai instrumen untuk mengungkapkan informasi-informasi mengenai tata kelola perusahaan yang mana seluruh elemen dalam *good corporate governance* akan mendorong perusahaan untuk menyamaratakan seluruh pemangkus kepentingan sehingga *sustainability report* akan semakin lengkap. Dengan kata lain, semakin lengkap informasi-informasi mengenai tata kelola dalam *good corporate governance* maka kemungkinan *sustainability report* akan dinyatakan lengkap.

Hasil penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosyid et al. (2017), serta Cep Dianul Adhan dan Sri Wahjuni Latifah (2018) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran yang dilandaskan pada teori yang sudah dijelaskan, berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) dalam Pratiwi (2020), hipotesis merupakan:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.”

Menurut Jonathan Sarwono (2017:13), hipotesis merupakan:

“... dugaan atau saran mengenai karakteristik atau sifat-sifat fakta yang dapat terjadi yang dianggap sebagai suatu permulaan dalam penyelidikan ilmiah.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.

H₃ : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.